

## ANALISIS PENGARUH KRISIS KEUANGAN PADA SUATU NEGARA

Istiaza Azra<sup>1</sup>, Maryam Batubara<sup>2</sup>, Ocha Pratika<sup>3</sup>, Satria Budi<sup>4</sup>  
[istiazaazra07@gmail.com](mailto:istiazaazra07@gmail.com)<sup>1</sup>, [maryam.batubara@uinsu.ac.id](mailto:maryam.batubara@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [ocha5804@gmail.com](mailto:ocha5804@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[satriabudisatria8@gmail.com](mailto:satriabudisatria8@gmail.com)<sup>4</sup>

UIN-SU Medan

### ABSTRAK

Tujuan penelitian berupa untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh krisis keuangan pada suatu negara. Metode penelitian kali ini menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Kebijakan moneter serta kebijakan fiskal ialah dua instrumen penting dalam pengendalian perekonomian suatu negara. Keduanya mempunyai peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Pemerintah merancang berapa besar uang yang ingin dipakai, kapan serta berapa tingkat suku bunganya. Antara penawaran serta permintaan adalah unsur utama dari keberhasilan dalam moneter, dikarenakan memilih bagaimana berfungsinya perekonomian. Kebijakan moneter dapat menggunakan unsur langsung serta tidak langsung. Instrumen langsung ialah instrumen kendali kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi secara langsung tujuan operasional bank sentral yang diinginkan. Instrumen tidak langsung merupakan instrumen pengendalian kebijakan moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi tujuan operasional bank sentral yang diinginkan. Tegasnya kebijakan keuangan Islam tidak boleh mengandung komponen riba atau bunga. Riba, termasuk bunga bank, dilarang keras dalam Islam. Dengan larangan ini, bunga bank, alat utama pengelolaan uang di perekonomian kapitalis, tidak berlaku lagi.

**Kata kunci:** Kebijakan moneter, Instrumen.

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2008 yang dimulai di Amerika krisis keuangan global kini menjadi permasalahan yang semakin dalam. Saat negara mendominasi ekonomi di seluruh dunia, krisis yang ada di Amerika menyebar dengan pesat kenegara-negara lain. Tiongkok adalah negara yang paling terpukul karena perekonomiannya terguncang ketika Amerika Serikat, pasar ekspor ialah salah satu terbesarnya.

Resesi yang sedang dirasa dunia menyebabkan bursa saham di beberapa tempat tutup selama beberapa hari, tak terkecuali Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini diperkirakan sama parahnya, atau bahkan lebih parah dibandingkan dengan depresi yang terjadi pada tahun 1929. Kekuatan keuangan global Amerika yang kuat berarti bahwa Amerika terikat dengan aktivitas perekonomian hampir di semua tempat di dunia. Pasar bebas yang didukung oleh sistem berlaku di hampir setiap negara di dunia, guncangan terhadap perekonomian Amerika dengan cepat menyebarkan akibat negatifnya ke negara-negara yang mempunyai ikatan bersama keuangan dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia tetap optimistis akibat masalah keuangan AS kepada stabilitas perekonomian Indonesia dapat diminimalisir. Buktinya, Rupiah hanya kehilangan sekitar 3% nilainya antara tanggal 1 Januari dan 10 Oktober 2008, jauh lebih tinggi dibandingkan mata uang Filipina (16%) atau mata uang Thailand (17%). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian kita tetap berada pada posisi yang baik meskipun terjadi krisis ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam upaya mengurangi dampak krisis keuangan global tahun 2008 dengan menyebabkan resesi yang lebih dalam.

Selain upaya pemerintah memperkuat sektor riil, pemerintah juga menekankan

Peraturan Pemerintah (Peru) yang sebelumnya peraturan perundang-undangan guna mengatasi akibat masalah keuangan global. Pertama, Perpu Nomor 2 Tahun 2008 membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan Indonesia. Kedua, Perpu No. 3/2008 berisi Perubahan Nilai Simpanan yang Diasuransikan oleh Perusahaan Penjamin Simpanan, dan ketiga, Peru No. 4/2008, Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Selain semua tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk membendung dampak parah krisis keuangan global, diperlukan kedamaian saat menanggapi krisis keuangan saat ini sehingga rasionalitas dapat dipertahankan dimasa mencarikalankeluar. Untuk mencapai tujuan tersebut, buku ini bertujuan untuk membawa kebijakan pemerintah ke perhatian masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami, memantau dan mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari krisis keuangan yang saat ini melanda dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan guna mendeskripsikan, menjelaskan, mendeskripsikan, dan merespons secara lebih akurat permasalahan yang ingin diselidiki melalui suatu kejadian. Sistem pengumpulan data adalah studi literatur yang terdapat dalam buku, internet, majalah, website, atau artikel otoritatif dan analisis penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan masalah yang ditemukan peneliti.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Pengertian Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter serta kebijakan fiskal ialah dua instrumen penting dalam pengendalian perekonomian suatu negara. Keduanya mempunyai peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro menuju keadaan yang diinginkan atau lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kondisi yang lebih baik berarti stabilitas harga yang lebih baik (inflasi lebih rendah). Kebijakan moneter memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar untuk menjaga kemampuan pertumbuhan ekonomi sambil mengendalikan inflasi.

Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral berupa pengendalian beberapa unsur keuangan antara lain suku bunga serta nilai tukar. Stabilitas moneter menjadi tujuan utamanya, lain dari pengaruh faktor internal maupun eksternal. Distribusi yang optimal, terpenuhinya keperluan dasar, kemudahan bekerja, perkembangan ekonomi riil, serta stabilitas ekonomi akan menjadi beberapa tujuan nilai tukar yang dapat membantu negara mencapai tujuan masa depannya. Praktik keuangan ini adalah hal terpenting dalam perekonomian. Namun, ketika sistem ekonomi memburuk, diperlukan perspektif berbeda mengenai produksi uang. Sistem ekonomi konvensional mempunyai pandangan yang beda mengenai pembuatan uang dibandingkan unsur ekonomi Islam.

Ada beberapa faktor yang membuat cara pemerintah serta sistem perbankan penentu banyaknya uang yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Setelah Anda diminta mencatat jumlah yang diberikan setiap hari, tingkat bunga pada dasarnya selamanya. Analisis analitis parsial dilanjutkan berdasarkan permintaan informasi dan komentar. Sistem moneter saat ini sedang dalam kondisi ketidakstabilan serta hal ini perlu dibicarakan kepada cabang perbankan guna menaikkan maupun menurunkan pembayaran

grosir serta eceran seperti yang diinginkan merupakan hal penting untuk dipahami.

Lain dari itu, sektor keuangan focus pada guna mengurangi maupun menaikkan dukungan terhadap perekonomian secara keseluruhan serta melibatkan perekonomian secara keseluruhan dalam tindakan yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Kebijakan moneter merupakan bahan hubungan masyarakat yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan dan perekonomian, baik tradisional ataupun syariah. Namun, beberapa perbedaan yang terlihat dalam prinsip serta tujuan pondasi Islam. (Alapján-, 2016)

#### B. Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia bertujuan mencapai serta menjaga keseimbangan Rupiah. Tujuan tersebut sama halnya tujuan BI pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dan juga sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Ada dua aspek agar rupiah stabil. Besarnya stabilitas rupiah yang utama ialah tahan kepada fluktuasi harga komoditas serta nilai tukar dampak inflasi. Oleh karena itu, ciri kedua adalah terkait fluktuasi nilai rupiah dibandingkan mata uang lainnya. Untuk menurunkan rupiah kepada mata uang lainnya, Indonesia menggunakan cara nilai tukar mengambang. Stabilitas nilai tukar sangat penting untuk mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan.

Tujuan kebijakan keuangan Islam, yang bagian pada ekonomi Syariah, ialah untuk mendorong kemakmuran serta keseimbangan. Maqasid Syariyya menjamin keadilan dan menjaga seimbang (iqamah al adl) guna memperoleh kemaslahatan dalam segala bidang hidup manusia, yaitu kemaslahatan umum, bukan kemakmuran khusus untuk pemerintah yang bersangkutan. Dikondisi ini, moneter sebagai unsur penentu di mendestabilisasi sistem makroekonomi. Kebijakan moneter yang sehat melalui mekanisme yang secara efektif menyampaikan informasi mengenai harga dan produksi dicapai melalui perekonomian yang stabil, yang pada urutannya memberikan ganda pada berbagai aspek salah satunya harga tenaga kerja.

Maka dari itu, BI mulai bergerak guna memerhatikan stabilnya nilai tukar serta sesuai pada nilai fundamentalnya dan selalu memerhatikan fungsi mekanisme pasar. Syarat untuk sampai tujuan di atas, BI membuat Inflation Targeting Framework (ITF) sejak 1 Juli 2005. Lingkup proyek sekarang sama dengan mandat serta standar yang dibahas oleh UU. Pada hal ini, yang utama yang perlu diperhatikan adalah inflasi (tujuan keseluruhan). BII secara konsisten telah melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sebagai respons terhadap dinamika dan perubahan perekonomian guna meningkatkan efektivitasnya. Stabilitas nilai tukar sangat penting untuk mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan.

Maka dari itu, BI juga telah memulai membahas volatilitas mata uang guna mengurangi volatilitas lebih tingginya mata uang dari biasanya, dibandingkan menaikkan volatilitas mata uang pada tingkat lain. Apalagi dengan tingkat inflasi yang diberikan pemerintah jika dibandingkan. Secara operasional, tujuan moneter adalah dengan memanfaatkan bermacam-macam unsur seperti sebagai contoh pasar terbuka pada pasar valuta asing rupee dan mata uang lainnya, menetapkan batas pembayaran, menetapkan simpanan minimum, membatasi kredit serta pinjaman, dan lain-lain. Lain dari itu, BI bisa menjalankan transaksi keuangan seperti biasa sesuai pada hukum syariah'. (Anisa Mawaddah Nasution & Batubara, 2023)

#### C. Prinsip Kebijakan Moneter

Sistem moneter Islam dilandaskan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam berikut:

- 1) Impian paling tinggi hanya milik Allah, pemilik tunggal dan mutlak.

- 2) Manusia ialah yang berkuasa di Bumi (Korifa), tetapi bukan pemilik sesungguhnya.
- 3) Segala kelimpahan dan keuntungan umat Islam ialah rahmat Allah, sehingga individu yang agak nakal juga mempunyai hak melindungi dirinya dari individu yang sama nakalnya.
- 4) Kelimpahan tidak boleh diulang kembali.
- 5) Kelimpahan hendaklah dibelanjakan.
- 6) Menghilangkan tidakseimbangannya antar dasar ekonomi individu berfungsi mengurangi masalah antar pemerintah.
- 7) Mengakui kewajiban-kewajiban setiap orang yang mendesak dan tidak dapat dihindari, terutama mereka yang tergabung dalam komunitas nonkonformis.

Sistem moneter syariah harus jauh dari unsur riba dan peminjaman bank. Dalam ekonomi Islam dilarang menggunakan uang bank, bahkan untuk riba sekalipun. Larangan ini membuat suku bunga bank, yang dianggap sebagai sarana pengelolaan keuangan yang paling penting, tidak dapat dijalankan. Sistem moneter Islam didasarkan pada aturan emas kesuksesan. Prinsip lebih lanjut dari kebijakan moneter yang sehat adalah:

- a) Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan rasa aman masyarakat (inflationtargeting). Disegi ini, langkah langkah inflasi dilakukan pada cara menjaga keseimbangan (trade-off) antara biaya dan perkembangan ekonomi.
- b) Cara untuk uang menjadi lebih proaktif, perlu diingat kemungkinan inflasi dan mengarahkan uang saat ini untuk mencapai target inflasi di masa depan dan efek pasokan uang yang tertinggal.
- c) Pelajari lebih lanjut mengenai tatacara spesifik yang dipakai guna menghasilkan respons guna milih tarif terhadap permintaan pinjaman. Saat tahap awal respons moneter, bank sentral membandingkan ekspektasi inflasi, perkembangan ekonomi, serta banyak unsur lainnya. Melihat pembahasan kebijakan perekonomian pemerintah menadi bagian dari penyesuaian moneter serta kebijakan makroekonomi lainnya.
- d) Sejalan pada prinsip “tata kelola yang baik' termasuk 'tujuan yang jelas, konsistensi, transparansi serta akuntabilitas”.(Dini Abdianti et al., 2023)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penyebab Krisis Moneter**

Penyebab krisis ini bukan karena lemahnya fundamental ekonomi Indonesia seperti terlihat pada data statistik di atas, namun yang paling utama adalah tingginya utang luar negeri swasta. Bukan sektor rupiah dalam negeri yang terpuruk, melainkan sektor luar negeri khususnya nilai tukar dolar AS yang mengalami overshoot jauh dari nilai sebenarnya. krisis Krisis yang sedang berlangsung ini merupakan depresiasi nilai tukar rupiah yang sangat tajam sebagai akibat dari serangan terhadap dolar AS secara tiba-tiba dan berkelanjutan (spekulasi) dan jatuh tempo utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Jika dolar AS tidak melemah, perekonomian Indonesia tidak akan terjerumus ke dalam krisis meskipun banyak terjadi distorsi pada tingkat mikroekonomi.

Defisit transaksi berjalan dan utang luar negeri yang besar dikaitkan dengan melemahnya sistem perbankan nasional dan dianggap sebagai penyebab krisis keuangan. Bank Dunia melihat empat alasan utama mengapa suatu krisis menyebabkan kebangkrutan. Penyebab utama krisis yang berkepanjangan ini adalah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sangat tajam. Namun hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor, masih banyak faktor lain yang berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing pengamat.(Tarmidi, 2003)

### **2. Kurangnya Respons Pemerintah dalam Mengatasi Penyebab Keuangan dan**

## Perekonomian

Mengingat bahwa resesi masih berada pada titik tertinggi sepanjang masa dan banyak orang yang di-PHK, maka penting untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: mudah. Jawabannya sering kali adalah dengan menggunakan program stimulus, dana talangan, dan kenaikan pajak untuk membantu dunia usaha dan perusahaan menyerap kerugian akibat resesi. Namun ada faktor lain yang menyebabkan resesi sehingga melemahkan perekonomian. Salah satu faktor utama yang harus diatasi pemerintah untuk mengatasi krisis ini adalah kebijakan fiskal.

Menurut laporan tersebut, pemerintah merancang berapa banyak uang guna dibelanjakan, berapa serta kapan tingkat suku bunganya. Penyeimbangan permintaan serta penawaran ialah hal yang utama dari keberhasilan struktur moneter, dikarenakan penentuan bagaimana berfungsinya perekonomian. Saat ini, kebijakan fiskal adalah bahan yang cukup sulit dipakai oleh pemerintah. Pemerintah bisa menaikkan belanja pada rentang waktu pendek, namun mereka melaksanakannya pada meningkatkan utang pemerintah lebih jauh lagi. Selama pemerintah terus memperketat kebijakan fiskal, dampaknya akan lebih besar daripada manfaatnya. (Ubur, 2012)

Oleh karena itu, kebijakan fiskal ialah bagian penting yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati di tahap awal rencana stimulus ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa rangkaian krisis keuangan yang dialami berbagai negara telah menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada sendi-sendi perekonomiannya. Misalnya krisis ekonomi tahun 1990-2001 yang menjadi krisis ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Akibat merosotnya nilai mata uang saat itu, Indonesia, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina terpaksa mengikutinya. Pada tahun 1999, ia mengatakan bahwa saat itu pasar saham Hong Kong sedang anjlok secara signifikan sehingga menyebabkan kerugian di seluruh pasar saham di seluruh dunia.

Dari tahun 1993 hingga 1996, rasio PDB terhadap PDB di empat negara besar ASEAN meningkat. Selama periode krisis terburuk, nilai ini melonjak hingga 180%, dan di Korea Selatan angka ini juga meningkat dari 13% menjadi 21%, mencapai angka tertinggi sebesar 40%. Karena situasi ini, Indonesia bergantung pada dukungan finansial dari Dana Moneter Internasional (IMF). Indonesia meminjam \$23,53 miliar pada tanggal 31 Oktober 1997 di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Program reformasi ekonomi yang direkomendasikan oleh IMF menargetkan empat bidang: restrukturisasi sektor keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan penyesuaian struktural. Untuk mendukung program ini, IMF akan menyediakan pembiayaan siaga sekitar US\$11,3 miliar selama periode program tiga hingga lima tahun. Meskipun ada paket keringanan, kekhawatiran terhadap utang korporasi, penjualan rupiah, dan kuatnya permintaan dolar menyebabkan nilai tukar rupiah semakin terpuruk.

Krisis ekonomi dimulai pada bulan November, ketika devaluasi mata uang mempengaruhi neraca perusahaan. Dampak lebih lanjut dari krisis keuangan adalah perlambatan ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal, termasuk PHK di sektor korporasi. Hal ini dipandang sebagai semacam kebijakan korporasi ketika perekonomian sedang terpuruk. Setidaknya sepanjang tahun 2009, pemerintah melaporkan bahwa sekitar 57.000 pekerja diberhentikan akibat krisis ekonomi tahun 2008–2009. Dengan latar belakang ini, pemerintah berupaya mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dampak situasi perekonomian global, terutama untuk kepentingan masyarakat kelas bawah.

Meningkatnya harga pangan dan kebutuhan sehari-hari menurunkan daya beli masyarakat, sehingga memaksa pemerintah mengubah besaran subsidi bahan bakar,

listrik, dan kebutuhan pokok untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan realokasi anggaran APBN dengan memindahkan dana ke daerah lain. Pada tahun fiskal 2009, beberapa kali revisi menurunkan angka tersebut dari 6,7% menjadi 7,2% menjadi 6,4% menjadi 6,9%, dan angka tersebut selanjutnya dikurangi sebesar 2% untuk memperhitungkan defisit. Sementara itu, upaya-upaya sedang dilakukan untuk melawan kenaikan harga pangan akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi dan kenaikan harga bahan bakar, terutama untuk membantu petani beradaptasi terhadap kenaikan harga/permintaan dan selanjutnya mendorong dan memfasilitasi akses terhadap kredit. (Amnifu, 2021)

### 3. Instrumen Pengendalian Kebijakan Moneter

Saat Ini Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen langsung dan tidak langsung. Instrumen langsung merupakan instrumen pengendalian kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi secara langsung tujuan operasional bank sentral yang diinginkan. Instrumen tak langsung merupakan unsur pengendali kebijakan moneter yang secara tak langsung bisa memengaruhi tujuan operasional bank sentral yang diinginkan. Harga (suku bunga) serta volume tabungan serta pinjaman dalam sistem perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank ialah dua hal utama yang dikendalikan. Kebijakan langsung bank sentral atau dengan mempengaruhi neraca bank umum merupakan pengendalian umum yang bisa di capai. Pengendalian ini dikatakan langsung dikarenakan adanya korespondensi satu-satu antar peralatan dengan tujuan operasional. contohnya, menetapkan batas pinjaman dapat secara langsung mempengaruhi jumlah pinjaman dalam negeri yang dapat diberikan oleh bank, yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah mata uang yang beredar.

Instrumen tidak langsung, di sisi lain, adalah upaya untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan menyinggung neraca bank sentral. Poin penting mengenai unsur keuangan tidak langsung adalah bank sentral dapat mempengaruhi posisi uang primer atau cadangan, yang dapat mempengaruhi pinjaman dan jumlah uang beredar. Kegiatan ini dikatakan tidak langsung dikarenakan bank sentral menuju tujuan kebijakannya dapat mempengaruhi kondisi pasar keuangan lewat salah satu fungsinya. Dengan kata lain, bank sentral adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengedarkan uang dengan mempengaruhi kondisi mendasar permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya, pengendalian jumlah uang beredar dilakukan dengan mempengaruhi neraca bank sentral itu sendiri, terutama pos-pos sisi kewajibannya, yaitu cadangan, yang mempunyai pengaruh yang luas tidak hanya terhadap kuantitas uang tetapi juga terhadap tingkat suku bunga sebuah kemungkinan.

Persyaratan cadangan yang lebih tinggi mengurangi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman, yang pada gilirannya menyebabkan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi. Suku bunga pinjaman yang tinggi mempengaruhi jumlah yang dapat dilunasi, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah uang beredar. Instrumen langsung umumnya tidak berbasis pasar (tidak berorientasi pada mekanisme pasar) dan kebijaksanaan (inisiatif) berada pada bank sentral. Instrumen tidak langsung dapat berbasis pasar atau non-pasar, dan kebijaksanaan terletak pada bank sentral atau pasar. Instrumen kebijakan moneter langsung dan instrumen kebijakan moneter tidak langsung mempunyai bentuk yang berbeda-beda, masing-masing mempunyai karakteristik dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Bentuk instrumen langsung yang paling umum adalah pembatasan suku bunga, pembatasan kredit, dan pinjaman yang diarahkan oleh bank sentral. (Alwaris & Hasan, 2023)

#### **Instrumen Langsung**

a) Penetapan Suku Bunga

Penetapan suku bunga merupakan instrumen langsung bank sentral yang berupa penetapan suku bunga baik pinjaman maupun simpanan pada sistem perbankan. Rencana suku bunga dapat mencakup suku bunga tetap atau selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan. Efektivitas tindakan langsung ini bergantung pada keandalan sistem penegakan hukum dan pemantauan.

Dengan berkembangnya dan terintegrasinya pasar keuangan domestik dan internasional serta berkembangnya produk perbankan, bank dan pelaku ekonomi mempunyai banyak pilihan untuk menghindari kebijakan penetapan suku bunga. Akibatnya, kebijakan penetapan suku bunga menjadi semakin tidak efektif. Namun peralatan ini digunakan di beberapa negara berkembang bahkan maju hingga akhir tahun 1980-an.

b) Pagu kredit

Batas kredit merupakan cara langsung untuk menentukan jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan oleh bank. Mengapa kelayakan kredit terhubung? Pasalnya, di hal ini bank sentral akan mengendalikan volume ataupun jumlah uang yang tersebar dengan cara mempengaruhi secara langsung dengan kredit dalam negeri yang dapat disalurkan oleh bank, yang pada akhirnya berdampak pada kuantitas, umumnya limit kredit bank ditentukan berdasarkan kuota.

Di sisilain, rasio masing-masing bank mungkin berpondasi pada ekuitas, simpanan serta pinjaman. Jalur kredit ini dipakai di beberapa negara Eropa Barat hingga akhir tahun 1980an serta masih dipakai di beberapa negara Afrika, Asia, dan negara-negara transisi. Penggunaan alat ini menciptakan distorsi dalam pengelompokan sumber daya serta mengurangi insentif untuk bank guna memobilisasi dana publik serta mengarahkannya ke cabang produktif.

c) Rasio Likuiditas (Rasio Likuiditas Hukum)

Rasio likuiditas mengharuskan bank untuk mempertahankan persentase tertentu dari sekuritas tertentu atau mata uang tertentu (biasanya utang pemerintah) pada waktu tertentu, selain mempertahankan cadangan utama instrumen yang digunakan oleh bank sentral dengan mengharuskan mereka untuk memegang. Secara umum menerapkan unsur ini berguna untuk menghimpun dana yang diperlukan untuk membiayai APBN dari penjualan (wajib) obligasi pemerintah pada perbankan sekaligus membuat pasar.

d) Pembiayaan Langsung (“Bertarget”, “Terpilih”, “Prioritas”)

Pembiayaan langsung adalah saluran kredit secara langsung (ataupun melalui lembaga pemerintah) ke cabang, program, atau proyek tertentu sarana langsung berupa kegiatan. Pada dasarnya pembiayaan langsung diserahkan pada cabang-cabang pembiayaan yang didukung oleh pemerintah tetapi bagi sektor swasta belum cukup menarik, ataupun akan dilakukan kegiatan, proyek, maupun kegiatan yang diutamakan oleh pemerintah. Maka dari itu, menggunakan alat ini sangat mahal serta mungkin kurang efektif. Pada prinsipnya, pinjaman langsung tidak diperlukannya agunan. Langkah ini sering dipakai di negara-negara transisi.

e) Instrumen Lainnya

Tidak hanya instrumen yang di atas, ada juga beberapa unsur langsung yang pernah digunakan di masa lalu (khususnya di Indonesia) untuk menggunakan jumlah uang beredar, langkah-langkah ini meliputi:

1) Pengurangan Mata Uang

Tindakan ini merupakan upaya langsung untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Alat musik ini dipakai di Indonesia pada tahun 1950 dan dikenal sebagai nama

“Gunting Shahrudin”. Pemotongan mata uang mencakup pengurangan nilai unit mata uang yang terkena dampak peraturan ini sebesar persentase tertentu (misalnya hanya 50%) dan mengganti sisanya dengan surat berharga pemerintah jangka panjang. Pengurangan uang ini secara langsung mengurangi jumlah uang yang beredar sebesar proporsi yang dapat digantikan oleh surat berharga.

#### 2) Pembersihan Finansial

Tindakan ini serupa, namun tidak sama dengan, pembersihan finansial. Pembersihan uang berarti mengurangi nilai uang sebesar persentase tertentu tanpa memberikan kompensasi atas jumlah yang dikurangi tersebut. Indonesia menurunkannya menjadi 10% pada tahun 1959, 3% pada tahun 1946 (1rupiah Jepang menjadi 3 sen dalam mata uang NICA), dan 1% pada tahun 1949 (100rupiah Jepang menjadi 1rupiah ORI) diturunkan menjadi Tahun 1965 menjadi 0,1% (dari 1000rupiah menjadi 1 rupiah). Efek pemurnian uang sama dengan kontraksi uang: jumlah uang beredar berkurang.

#### 3) Penetapan uang muka impor

Ketentuan ini berlaku bagi importir yang melakukan transaksi pembelian dari luar negeri. Peraturan ini mewajibkan importir untuk membayar persentase tertentu sebagai uang muka pembelian mata uang asing yang diperlukan untuk mengimpor barang yang diperlukan dari luar negeri. Karena importir harus melakukan pembayaran di muka, instrumen ini memungkinkan bank sentral mengontrol aliran uang dari sisi importir dengan menentukan proporsi uang muka yang dilakukan importir. (Rasbin & Hermawan, 2014)

### **Produk Tidak Langsung**

- a. Cadangan Minimum (CWM) cadangan minimum adalah jumlah minimum alat likuid yang harus dimiliki suatu bank. Cadangan minimum dibagi menjadi cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan utama lebih sering disebut dengan cadangan wajib.
  - 1) Cadangan pokok Cadangan pokok, atau yang secara tidak langsung dikenal sebagai cadangan wajib, adalah peraturan bank sentral yang mengharuskan bank untuk menjaga sejumlah bahan likuid yang setara dengan persentase tertentu dari keharusan lancarnya. Beberapa dari bahan likuid tersebut harus disimpan dalam bentuk uang tunai dan lainnya dalam bentuk rekening giro bank sentral. Cadangan utama ini merupakan instrumen tidak langsung, karena di satu sisi mempengaruhi kemampuan bank dalam memberikan kredit, dan di sisi lain mempengaruhi tingkat suku bunga. Meskipun cadangan primer merupakan instrumen tidak langsung, namun merupakan jenis instrumen non-pasar karena tingkat cadangan primer ditentukan oleh bank sentral.
  - 2) Cadangan Sekunder Selain cadangan utama, bank sentral mewajibkan bank untuk memiliki tambahan alat likuid di samping cadangan utama (atau menentukan aset likuid tertentu yang harus disimpan dalam cadangan utama) yang mungkin diperlukan. Tambahan aset likuid ini sering disebut sebagai cadangan sekunder. Aset likuid yang umumnya dihitung sebagai cadangan sekunder adalah surat berharga yang dimiliki oleh bank sentral dan pemerintah. Tujuan penetapan cadangan sekunder umumnya berkaitan dengan upaya pemerintah atau bank sentral untuk mendorong bank membeli surat berharga pemerintah atau bank sentral.
- b. Fasilitas Diskonto adalah fasilitas kredit (dan/atau simpanan) yang diberikan oleh bank sentral kepada bank dengan menggunakan surat berharga sebagai jaminannya, dan tunduk pada tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Besar kecilnya tingkat diskonto mempengaruhi permintaan pinjaman dari perbankan. Jika bank sentral ingin menaikkan suku bunga, maka dapat

memberi sinyal dengan menaikkan tingkat diskonto (suku bunga) dalam sistem ini.

Di beberapa negara, tingkat diskonto yang ditetapkan untuk skema ini berada di atas suku bunga pasar uang antar bank (PUAB), sedangkan di beberapa negara berada di bawah suku bunga PUAB. Secara umum, terdapat sanksi atas penggunaan sistem diskonto ini oleh bank, sehingga sistem diskonto bank sentral jarang digunakan karena berfungsi sebagai mekanisme katup pengaman untuk menjaga stabilitas pasar uang jangka pendek.

c. Sistem Rediscounting merupakan instrumen tidak langsung yang serupa dengan sistem diskonto berupa fasilitas kredit jangka pendek (perbedaannya hanya surat berharga yang digunakan adalah surat berharga pasar uang dan bukan surat berharga bank sentral). Peraturan perbankan yang menetapkan tingkat diskonto ulang Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang dapat digunakan dan didiskontokan kembali (pembelian) oleh bank sentral.

Secara umum, pengenalan fitur ini ditujukan untuk pengembangan lebih lanjut pasar surat berharga pasar uang dan sangat berguna meskipun OPT masih terbatas dan belum berfungsi dengan baik karena terbatasnya jumlah surat berharga yang tersedia.

d. Operasi Pasar Terbuka (OPT) ialah alat moneter tidak langsung yang utama dikarenakan lewat OPT bank sentral bisa lebih efektif mencapai tujuan operasionalnya (seperti suku bunga dan jumlah uang beredar). Karena OPT dapat mengirimkan sinyal mengenai arah kebijakan moneter, maka pelaksanaannya berlangsung secara umum serta membentuk suku bunga didasari berdasarkan peraturan pasar. (Ascarya, 2002)

#### **4. Perlakuan Terhadap Moneter Berdasarkan Konsep Syariah**

Pertama-tama, Islam mempunyai pandangan tersendiri terhadap sistem moneter. Syekh Abdul Kodim Zam yang dikutip oleh Levi dan Bukori dalam bukunya *Islamic Economics* mengatakan, "Ekonomi syariah bukanlah sebuah pilihan melainkan sebuah solusi," dan bahwa sistem moneter adalah sistem keuangan suatu negara pengadaan dan regulasi, yang menurutnya merupakan hal yang paling penting. Di negara mana pun, keuangan menentukan dasar keuangan yang menjadi dasar perusahaan ini mengevaluasi semua unsur berbagai mata uang lainnya. Jika unit pondasi keuangan ialah emas, sistem keuangan disebut sistem moneter emas.

Jika unit dasarnya adalah perak, maka disebut sistem moneter perak, dan produk keuangan bank syariah sesuai dengan hukum syara'. Hampir setiap implementasi moneter konvensional dan sekuritas yang mendasarinya mengandung unsur yang menarik. Oleh karena itu, instrumen tradisional dengan elemen menarik (suku bunga bank, tingkat diskonto, operasi pasar terbuka dengan jaminan suku bunga yang ditentukan) tidak dapat dipakai guna menerapkan kebijakan Islam. Namun, menurut banyak ekonom Islam, banyak alat kebijakan moneter tradisional yang masih dapat dipakai guna mengelola uang dan kredit. (Mubyarto, 2001).

Persyaratan Cadangan, Plafon Kredit Agregat dan Selektif, Persuasi Moral dan Perubahan Basis Moneter Pada mulanya rezim Islam, defisit fiskal kurang terjadi serta sistem pengelolaan fiskal diambil alih oleh Baitul Mall. Baitul Mall merupakan lembaga khusus yang mengelola seluruh pemasukan atau pengeluaran properti milik umat Islam. Kepemilikan adalah hak Baitul Mall dan dalam beberapa hal bahkan kepemilikannya mungkin sudah jelas. Jika suatu aset diperoleh, maka aset tersebut menjadi milik Baitul Mall pada saat perolehan, terlepas dari apakah aset tersebut termasuk dalam Perbendaharaan. Karena Baitul Mall mencerminkan sebuah kontribusi, bukan lokasi.

Namun hak tersebut juga berlaku bagi Baitul Mall sebagai hak yang harus diberikan untuk kepentingan umat Islam. Jika dicantumkan pada salah satu dana wakaf

Baitul Mall, hasilnya harta tersebut merupakan point dari pengeluaran Baitul Mall, terlepas dari apakah harta tersebut dipungut dari kas negara atau tidak. Karena harta tersebut dianugerahkan atau dikeluarkan melalui tangan penguasa Islam dan hamba-hambanya, maka harta tersebut di urus menggunakan hukum Baitul Mall, baik pemasukan maupun pengeluaran. Kontrol moneter awal pemerintahan Islam mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan sosial.

Seluruh alokasi Dana Baitul Mall berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk alokasi untuk dakwah Islam. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan dan penawaran agregat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan maksimalnya penggunaan sumber daya alam. Dalam hal ini adalah peristiwa hijrahnya kaum Muhajirin ke Madinah dan persaudaraan mereka dengan kaum Ansar. Selain itu, penyebaran agama Islam juga akan meningkatkan pendapatan Baitul Mall. Krisis mata uang menyadarkan kita betapa pentingnya kembali ke prinsip syariah dan memperkuat kembali perekonomian nasional. Sebab, sebagaimana dikatakan Imam as-Syatibi, tujuan diciptakannya syariat adalah untuk mewujudkan *ad-diyat al-komshah*, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, kemauan, dan harta benda. (Putri & Nasution, 2022)

Penguatan perekonomian nasional kini telah menjadi paradigma pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi peran para pengusaha besar saja, namun bertumpu pada semua pihak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setidaknya ada tiga cara kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Pertama, ekonomi syariah berkontribusi terhadap pengembangan sektor riil. Kedua, Ekonomi syariah berkontribusi dalam menarik investasi asing dari Indonesia, khususnya dari Timur Tengah, melalui industri keuangan syariah. Ketiga, gerakan ekonomi syariah mendorong munculnya perilaku ekonomi beretika di masyarakat Indonesia. (Rusliani, 2018)

## **5. Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Moneter Berdasarkan Ekonomi Syariah**

Tegasnya kebijakan keuangan Islam tidak boleh mengandung komponen riba atau bunga. Riba, termasuk bunga bank, dilarang keras dalam Islam. Dengan larangan ini, bunga bank, alat utama pengelolaan uang di perekonomian kapitalis, tidak berlaku lagi. Pengelolaan uang Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Tata cara kebijakan keuangan yang sama dengan hukum Islam harus mengandung enam unsur berikut:

- Pertama, bank sentral harus menentukan kenaikan uang beredar (M) tahunan sesuai dengan tujuan perekonomian nasional. Pertumbuhan jumlah uang beredar erat kaitannya dengan pertumbuhan (Mo) uang berdaya tinggi. Uang beredar dan simpanan bank sentral. Bank sentral harus memantau pertumbuhan MO yang dialokasikan kepada pemerintah, bank umum, dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan situasi perekonomian dan tujuan perekonomian Islam. Dana yang diberikan kepada bank umum, khususnya dalam bentuk *madaraba*, harus digunakan oleh bank sentral sebagai alat kualitatif dan kuantitatif dalam pengelolaan kredit.
- Bank komersial diharuskan untuk memelihara cadangan wajib tertentu di bank sentral. Persyaratan cadangan minimum menurut undang-undang membantu memastikan simpanan dan pada saat yang sama menyediakan likuiditas yang cukup bagi bank. Di sisi lain, bank sentral harus menanggung biaya yang timbul dalam

mobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank umum.

- Batas kredit (batas kredit), kebijakan moneter menetapkan batas kredit yang dapat diberikan oleh bank komersial untuk memastikan bahwa pinjaman konsisten dengan tujuan keuangan dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar bank komersial.
- pinjaman berbasis nilai, penggunaan kredit harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Pembiayaan mengarah pada optimalisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan dari pinjaman juga bermanfaat bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan mengenai jaminan kredit antara negara dan bank umum untuk mengurangi risiko dan biaya yang ditanggung bank. (Rusliani, 2018)

## **KESIMPULAN**

Penyebab krisis ini bukan karena lemahnya fundamental ekonomi Indonesia seperti terlihat pada data statistik di atas, namun yang paling utama adalah tingginya utang luar negeri swasta. Bukan sektor rupiah dalam negeri yang terpuruk, melainkan sektor luar negeri khususnya nilai tukar dolar AS yang mengalami overshoot jauh dari nilai sebenarnya. Fokus sektor keuangan adalah untuk menambah atau mengurangi dukungan terhadap perekonomian secara keseluruhan dan melibatkan perekonomian secara keseluruhan dalam tindakan yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Kebijakan fiskal merupakan bidang penting yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati pada tahap awal rencana stimulus ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa rangkaian krisis keuangan yang dialami berbagai negara telah menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada sendi-sendi perekonomiannya. Misalnya krisis ekonomi tahun 1990-2001 yang menjadi krisis ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Meningkatnya harga pangan dan kebutuhan sehari-hari menurunkan daya beli masyarakat, sehingga memaksa pemerintah mengubah besaran subsidi bahan bakar, listrik, dan kebutuhan pokok untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan realokasi anggaran APBN dengan memindahkan dana ke daerah lain.

Saat Ini Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen langsung dan tidak langsung. Instrumen langsung merupakan instrumen pengendalian kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi secara langsung tujuan operasional bank sentral yang diinginkan. Instrumen tidak langsung ialah unsur mengendalikan kebijakan moneter yang tujuan operasional bank sentral yang diinginkan. Beberapa poin utama yang terkendali ialah suku bungaserta besarnya simpanan ataupun pinjaman pada struktur perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank. Mengendalikan langsung dapat dicapai lewat kebijakan langsung bank sentral maupun dengan menyinggung neraca bank umum. Pengendalian ini disebut langsung karena terdapat korespondensi satu-satu antara peralatan dengan tujuan operasional. Instrumen tidak langsung, di sisilain, adalah upaya untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan mempengaruhi neraca bank sentral. Poin penting mengenai instrumen keuangan tidak langsung adalah bahwa bank sentral dapat mempengaruhi posisi uang primer atau cadangan, yang dapat mempengaruhi pinjaman dan jumlah uang beredar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alapján-, V. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Alwaris, S. A. A. P., & Hasan, N. (2023). Adopsi Nilai-Nilai Islam pada Instrumen Kebijakan Moneter dalam Mengontrol Peredaran Uang. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 65–77. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.601>
- Amnifu, F. H. W. (2021). Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Meningkatkan

- Perekonomian Nasional Dan Implikasinya Terhadap Anggaran Pertahanan ( Studi Kasus Provinsi Timor Timur Di Indonesia Pada Tahun 1976-1998 ) Monetary and Fiscal Policy in Improve the National Economy and the I. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 6(1), 97–123.
- Anisa Mawaddah Nasution, & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144–154. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>
- Ascarya. (2002). Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter. In Seri Kebanksentralan (Issue 3).
- Dini Abdianti, Anisa Restu, & Sholahuddin Al Ayyubi. (2023). Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(2), 106–120. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>
- Mubyarto. (2001). Mengatasi Krisis Moneter Melalui Penguatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 16(2), 98.
- Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perepektif Ekonomi Islam. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 166. <https://doi.org/10.30821/se.v8i1.13778>
- Rasbin, & Hermawan, I. (2014). Analisis Shocks Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian Terbuka: Kasus Dua Sektor Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), 1–14.
- Rusliani, H. (2018). Ekonomi Syari'ah Solusi Dalam Menghadapi Krisis Moneter (Perbandingan Malaysia – Indonesia). *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 199. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3518>
- Tarmidi, L. T. (2003). Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(4), 1–25. <https://bmeb.researchcommons.org/bmeb/vol1/iss4/6/>
- Ubur, H. (2012). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur). *Aspirasi*, 2(2), 209–224.
- Depok : Penebar Swadaya.
- Rulli N. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Syaibani, Y.A. “New Media: Teori dan Perkembangannya”, dalam Chatia Hastasari dkk. (2011). *New Media Teori dan Aplikasi*. Surakarta: Lindu Pustaka.
- We are social. (2019). *Digital 2019: Global Internet Use Accelerates*. Diakses melalui <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates>.